TEORI EKONOMI DAN PERKEMBANGANNYA (Kuliah I)

Teori pasar murni dikemukanan pertama kali oleh Adam Smith (1723-1790) dan kemudian sering disebut sebagai sistem kapitalisme yang terdesentralisasi. Dimana pemerintah sama sekali tidak boleh mengatur perekonomian. Teori ini mempercayai adanya invisible hand, yang dapat mengatur sendiri keadaan ekonomi suatu negara. Dimana semua orang dianggap akan terpuaskan dengan sendirinya apabila setiap orang diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan masing-masing sehingga akhirnya tercapai kesejahteraan umum (general welfare)

Dalam kenyataannya konsep ideal dari teori Adam Smith sering tidak tercapai seperti yang direncanakan, tetapi sering terjadi kesenjangan antara teori dan keadaan sebenarnya. Cukup banyak kendala-kendala yang sering terjadi untuk pencapaian kesejahteraan umum seperti yang dicita-citakan dari teori Adam Smith ini. Seringkalai muncul dampak-dampak negatif dari teori ini, misalnya munculnya Monopoli, pengejaran kepentingan perorangan yang terlalu berlibihan, kecenderungan produksi barang yang tidak berkualitas yang hanya mengutamakan kepentingan perusahaan tanpa melihat dampak terhadap konsumen, dampak lingkungan seperti polusi, pencemaran, exploitasi alam membabi buta.

Mengacu pada kelemahan-kelemahan ini, maka ada beberapa teori yang menjadi tandingan dari teori Adam Smith ini, misalnya Sistem Capitalism (State Capitalsim, atau economic Nationalism), yaitu suatu sistem kapitalisme yang diatur dan dipimpin oleh negara, yang diusulkan oleh Friedrich List (teori ini sering kali dianggap sebagai teori capitalis semu oleh Ersatz Capitalism).

Model capitalsm ini selanjutnya disempurnakan dalam bentuk model kapitalism welfare state atau sistem kapitalism dengan pengaturan alokasi dana-dana pemerintahan untuk mendistribusikan kekayaan nasional. Ini merupakan model kapitalisme yang telah disempurnakan (J.M. Keynes (1936)) dan kemudian disebut sebagai sistem ekonomi campuran (mixed economy)

Dari uraian tersebut kita telah mengetahui ada 3 sistem ekonomi yang mendasar yaitu state capitalism, welfare state dan mixed economy). Ke tiga sistem ini berseberangan dengan sistem ekonomi sosialisme (baik itu sistem sosialisme murni, maupun sistem sosial yang bercampur dengan sistem pasar (mixed socialism). Dalam kenyataanya sistem sosial murni diterapkan secarara penuh di Uni Soviet dan sejumlah negara Eropa Timur mulai dari tahun 1922 (Lenin), sedangan sosialisme campuran diterapkan di RRC, Yugoslavia, serta sejumlah negara Afrika. Kemudian ada satu lagi sistem ekonomi kelima yang sering disebut sistem pasar sosialis (social market economy).

Pada masanya Amerika Serikat sering disebut sebagai pemimpin negara “paling kanan” dan hampir semua negara-negara Eropa Barat dimasukkan dalam kategori negara-negara kalitalis campuran, sedangakan Uni Sovyet sering disebut sebagai pemimpin negara “paling kiri: dimana hampir semua negara-negara di Eropa Timur dimasukan ke dalam negara-negara sosialis. Sedangkan negara-negara dunia ketiga atau sering disebut sebagai negara berkembang, atau nonblok, memiliki sistem ekonomi kapital seperti chile, Kenya dan Singapura, negara state capitalism seprti Mexico, Nigeria dan Indonesia, dan sebagian ada yang sistem ekonomi sosialism seperti Mandagaskar, Irak dan Myanmar) Pada kenyataannya setiap negara bebas untuk mengatur kebijakan ekonomi apa yang akan diterapkan dan paling cocok untuk mencapai tujuan negara.

Setelah tahun 1989, dimana pada waktu itu terjadi penyatuan antara Jerman Timur dan Jerman Barat, dan diiringi oleh perubahan fundamental sistem ekonomi Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya, maka sistem kapitalsime dan variasinya lebih diterapkan di lebih banyak negara. Meskipun demikian sistem ekonomi sejumlah negara komunis tidak serta merta berubah secara radikal dan tetap berpegangn pada sistem sosialisme (sistem pasar sosialisme). Di negara-

negara tersebut kepemilikan faktor-faktor produksi oleh perorangan mulai dilonggarkan, tetapi perencanaan terpusat tetap dipertahankan dan perusahaan negara berperanan besar dalam struktur ekonomi nasional.

Jika kita membandingkan dengan kondisi sistem ekonomi di Indonesia, pada kenyataannya selama 54 tahun kemerdekaan, Indonesia mengalami 3 tahap pembangunan nasional,yaitu pembangunan politik (1945-69), pembangunan ekonomi (1969-94) dan pembangunan sosial (1994-2019)(Lane, Jane Erik & Svante Ersson (1997)). Pembangungan politik sering disebut sebagai sebagai pembangunan bangsa (nasional building), sedangkan pembangunan ekonomi menekankan pada peningka tan pendapatan per kapita,kemudian pembangunan sosial meliputi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pada hakikatnya ketiga proses ini yaitu pembangunan politik, ekonomi dan sosial terjadi pula di negara-negara lainnya dalam konteks dan kondisi yang berbeda-beda. Dan pada umumnya pula pembangunan ekonomi merupakan merupakan prioritas utama, karena pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan papan selalu harus didahulukan sebeum memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya.

Pembangunan Sosial

Menurut Nancy Birdsall dari Bank Dunia mengatakan bahwa investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang biasanya masuk kategori pembangunan sosial, dan dalam waktu tidak lama dapat berdampak positip pada pertumbuhan ekonomi nasioanl. Artinya pengeluaran-pengeluaran nasional yang berupa investasi sosial telah memungkinkan manusia meningkatkan kualitas sebagai sumber daya yang mampu menghasilkan produksi materiil yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan perkataan lain mengadakan investasi dalam pengembangan sosial merupakan ilmu ekonomi yang baik. Atau dengan kata lain pembangunan sosial tidak lain daripada pembangunan ekonomi.

Pada gilirannya model-model pembangunan ekonomi seringkali hanya memasukkan variable-variable ekonomi saja dan variable non ekonomi dianggap tidak penting atau diabaikan. Sehingga akibatnya. Perkembangan beberapa teori lainnya pada awalnya bersumber dari reaksi adanya ketidak percayaan terhadap sistem ekonomi kapitalisme ajaran Adam Smith yang terkadang tidak membawa kesejahteraan masyarakat, walaupun diakui seringkali terjadi kesejahteraan yang luar biasa tinggi tetapi terjadi hanya pada sekelompok orang saja. Kelompok lainnya malah semakin miskin. Pemilik modal biasanya diuntungkan tetapi buruh sering dirugikan karena tidak memiliki modal yang cukup. Selanjutnya bisa terjadi kesenjangan antara dua klas masyarakat. Dan hal ini dibahas oleh Karl Max, yang tercantum dalam tulisannya Manifesto Komunis (1848) kemudian dilanjutkan kembali dalam tiga jilid bukunya Das Kapital (1867).

Meskipun teori ekonomi sosialisme Marx dianggap gagal diterapkan di Uni Sovyet dengan akibat bubarnya Uni Soviet itu sendiri tahun 1991, tetapi teori kapitalisme juga mengalami kritikan yang tidak sedikit. Sekitar tahun 1936 sistem kapitalisme mengalami depresi, menyengsarakan semua elemen ekonomi, seperti buruh, tuan tanah, pemodal dll.

J.M Keynes yang memelopori teori yang bersifat umum dapat menunjukkan kekeliruan teori pendahulunya yang terlalu sempit dan khusus, seperti teori Klasik dan Neoklasik, tetapi mengungkap juga kesalahan mendasar dari teori ekonomi kapitalisme ala Adam Smith. Dengan teori barunya Keynes dianggap bersjasa menyelamatkan kapitalisme itu sendiri dan sistem kapitalisme yang sudah disempurnakan yang akhirnya teori nya cukup dapat mengglobal dan merajai sistem ekonomi dunia.

Selanjutnya bila kita tillik, sistem ekonomi Indonesia sedang bergulat dalam masalah pergulatan paradigmatik, perjuangan para pakar ekonomi tentang perlunya dikembangkan paradigma baru dalam pemikiran-pemikiran ekonomi untuk memecahkan persoalan bangsa. Setelah paradigma baru yang lebih tepat dapat diterima, yang mengandung sistem nilai atau ideologi bangsa yaitu Pancasila, maka kekeliruan-kekeliruan asumsi teori lama dapat dihilangkan.Dan akhirnya pembangunan pun dapat mengacu pada teori ekonomi baru. Ini seharusnya menjadi misi dan visi para ekonomi Indonesia.

Pada kenyataaanya negara Indonesia telah mengambil langkah keliru di masa lalu dimana kita terlalu menekannkan pada pertumbuhan ekonomi material yang akibanya melebarkan jurang antara yang miskin dan kaya. Jadi selanjutnya sebaiknya diupayakan pembangunan lebih diarahakn pada pembangunan sumber daya manusia.

Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang pernah terjadi di negara Indonesia sebenarnya merupakan akibat logis dari dari investasi berlebihan dalam beberapa sektor seperti real estate yang sebenarnya kurang produktif tetapi sangat menguntungkan. Usaha-usaha spekulatif dari sektor ini seringkali dibiayai dengan kredit-kredit perbankan, yang pada giliranya perbankan turut terimbas krisis ekonomi ini. Banyak sekali bank-bank tutup dan pemerintah terpaksa turun tangan dengan program rekapitalisasi dan restukturisasi. Sehingga kenyataanya seringkali terjadi tarik ulur antara pemerintah dan swasta, Dunia usaha yang pada awalnya tidak mau diatur pemerintah, dalam keadaan krisis ekonomi ternyata menggantungkan diri pada kebijaksanaan pemerintah.

Penyimpangan yang amat besar dengan konsekuensi analitik serius adalah tentang peranan individu dalam masyarakat yang tidak dianggap penting oleh ekonom masa kini, padahal dianggap sangat penting oleh Adam Smith. Pandangan ini sebenarnya lebih relevan dengan keyakianan bangsa Indonesia tentang adanya kebenaran asas kekeluargaan (brotherhood) dan bentuk usaha bersama yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, yang selanjutnya diartikan sebagai asas demokrasi ekonomi atau asas kerakyatan. Sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan bukan berarti bebas untuk bersaing saling mematikan. Sebenarnya kita sudah memiliki konsep-konsep mendasar dari sistem ekonomi sendiri, meskipun terkadang pada kenyataan kita terlalu berusaha memenuhi kriteria-kriteria pada ekonomi asing.

Frans Seda yang ikut berkiprah dalam kegiatan ekonomi praktis menyatakan bahwa ekonomi pancasila lahir dari suatu political will, yang merupakan tanggapan terhadap amanat penderitaan rakyat.

Perkembangan Gagasan Ekonomi Indonesia

Dalam kenyataannya studi tentang sejarah ekonoi sungguh amat penting karena disamping begitu banyak masalah-masalah ekonomi masa kini sebenarnya bermula dari masa lalu. Sejarah dan kejadian selalu berulang.

Dewasa ini dalam suasana liberalisasi dan globalisasi tidak terlihat semangat kaum elit untuk mempercayai potensi ekonomi rakyat. Seharusnya pemerintah lebih memihak pada ekonomi rakyat. Tetapi pada gilirannya pemerintah mendapat tekanan luar biasa sebab pada kenyataannya sektor ekonomi modern lebih dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar.

Kita perlu belajar dari sejarah demi masa depan yang lebih baik dari anak cucu kita.

Paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Berbagai teori ekonomi yang berkembang di Barat pada umumnya lebih dilihat dari sisi pandangan kaum elit atau kaum borjuis. Sehingga akibatnya setiap kemajuan cenderung dari seberapa besar peranan kaum elit terhadap perekonomian bukan seberapa besar peran rakyat. Dalam kenyataannya sejak jaman Belanda sampai menjelang kemerdekaan Indonesia petani dan rakyat kecilah yang sebenarnya menjadi penyumbang paling besar bagi keberhasilan penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun.Tetapi sebaliknya rakyatnya menjadi kuli-kuli yang hidup miskin.Jadi eksploitasi kolonialme dan imperalialisme merupakan penyebab utama kemiskinan dan kemerdekaanlah yang dapat membebaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan.

Selama 21 tahun pertama Indonesia merdeka (1945-1966) perekonomian bangsa menghadapi tantangan dan ujian berat termasuk masalah politik dalam dan luar negeri, yang nyaris mempengaruhi sektor-sektor ekonomi.Meskipun pada tahun 1959 paham kapitalisme –liberalisme secara konstutional ditolak dengan berlakunya UUD 1945, tetapi sistem ekonomi Nasional ternyatak berkembang menjadi sisteim etatistik (serba negara) yang mematikan segala daya kreasi masyarakat. Ekonomi komando yang berlangsung selama tujuh tahun (1959-1966) dan mencapai titik paling kritis dengan adanya hiperlinflasi 650% pada tahun 1966, hampir melumpuhkan seluruh sitem produksi dan distribusi nasional.

Menjelang berakhirnya Orde lama (1963) Soekarnao menyampaikan konsep ekonomi yang terkenal dengan sebutan Dekon (Deklarasi Ekonomi) semacam janji atau tekad untuk menggunakan sistem ekonomi pasa, sebagai koreksi atas prakte-praktek ekonomi komando.Tekad ini sayang tidak dapat terlaksana karena partai-partai politik menafsirkan secara berbeda-beda. Prinsip Dekon akhirnya dilupakan orang.

Ekonomi orde baru mulai 1966 secara radikal membalikan arah perjalanan ekonomi Indonesia. Paradigma pembangunan mengarah pada penerapan demokrasi ekonomi dan politik ekonomi diarahkan pada upaya dan cara menggerakan kembali roda ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pencetakan uang yang berlangsung tanpa kendali dihentikan, anggaran belanja pemerintah dibuat berimbang, dan produksi dalam negeri, pangan dirangsang untuk memenuhi kebutuhan nasional yang terus bertambah.Pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian REPELITA.

Pembangunan yang mensejahterakan Rakyat

Menurut Mubyarto dalam membangun sistem ekonomi. Selama 54 tahun Republik Indonesia dapa dikenal ada trilogi pembangunan dalam konteks sejarah perjalanan bangsa sbb :

1. Tahap pembangunan bangsa (national building) 1945-1969
2. Tahap pembangunan ekonomi (1969-1994)
3. Tahap pembangunan manusia (1994-2019)

Dari segi teori ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi disebut berhasil apabila ada kenaikan besa dalam volume dan nilai produksi barang dan jasa, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.Akan tetapi dalam kenyataannya belum tentu barang dan jasa yang diproduksi suatu bangsa bisa dibagi secara merata, karena sering terjadi ada sebagian warga belum dapat ikut menikmati. Mereka mereka termasuk masyarakat di bawah garis kemiskinan.

Dalam perjalanan sejarah pembangunan di Indonesia, selalu ada semacam kontes antara yang menginginkan peran besar dari negara sesuai pasal 33, UUD 45, dan ada sebagian yang menginginkan kebebasan sistem pasar yang mampu mengembangkan demokrasi ekonomi sesuai penjelasan pasa 33.

Jamie Mackie dan Andrew Macintyre mewadahi berbagai kepentingan yang berkontes ini ke dalam tiga mazhab politik ekonomi sbb :

1. Kaum teknokrat (ekonomi) yang kompak dan berpaham bebas (free marketers), dan mereka berada pada di tiga pusat kekuasaan yaitu Departemen Keuangan, Bappenas dan Bank Indonesia.
2. Kaum Intervensionis yang menginginkan peran besar dari negara dalam pembangunan khususnya dalam proses menuju industiralisasi.
3. Kaum Nasionalis pola lama (old style nationalist) yang ingin selalu berpegang teguh pada ideologi bangsa sebagaimana tercantum dalam 33 UUD 45.

Dalam prakteknya bisa terjadi penyeberangan-penyebaerangan dari suatu mahzab ke mahzab lain, sehingga bisa dikatakan bahwa teori tadi kurang tepat dalam kondisi yang ada di Indonesia, atau memang kondisi di negara Indonesia adalah kondisi yang khusus sehingga tidak dapat dianalisis menggunakan teori-teori dari dunia barat.